

**PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL, DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT  
TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FEBMI FERBIENTI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2017**

## ABSTRAK

### **Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress***

**Oleh**

**FEBMI FERBIENTI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit dan rapat komite audit. Menggunakan 174 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015.

Penelitian ini membuktikan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

**Kata Kunci:** *Corporate governance, agency cost, struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan financial distress.*

## **ABSTRACT**

### **The Effect of Commisioner's Structure, Institutional Ownership and Audit Committee Characteristics on Financial Distress.**

**By**

**FEBMI FERBIENTI**

The objective of this research is to measure the effects of corporate governance mechanisms related to financial distress. The corporate governance mechanisms examined in this study are the size board of commisioners, institutional ownership, and characteristics of audit committee (size and number of meeting). Based on the samples of 174 firm-years listed companies on the Indonesian Stock Exchange from 2013 to 2015.

The results provided strong evidence for a negative relationship between the meeting frequency of audit committee and the probability of firm experienced in financial distress. There is no relationship between the size of board of commisioners, institutional ownership, size of audit committee with probability of firm experienced financial distressed.

**Keywords: Corporate governance, agency cost, board structure, institutional ownership, audit committee dan financial distress.**

**PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL, DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT  
TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***

Oleh

**FEBMI FERBIENTI**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi

**: PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS,  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN  
KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP  
FINANCIAL DISTRESS**

Nama Mahasiswa

**: Febmi Ferbienti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1211031123

Program Studi

**: S1 Akuntansi**

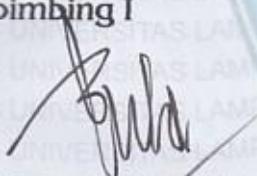
Jurusan

**: Akuntansi**

Fakultas

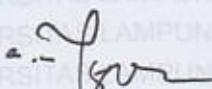
**: Ekonomi dan Bisnis**

Pembimbing I



**Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.P.A., C.A., Ak.**  
NIP 19570608 198703 1 003

Pembimbing II



**Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**  
NIP 19820623 200812 0 001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**



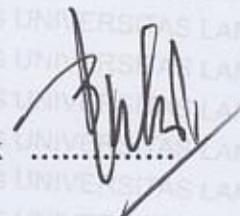
**Dr. Farichah, SE., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengudi**

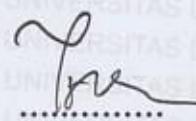
Ketua

: **Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.P.A., C.A., Ak** .....

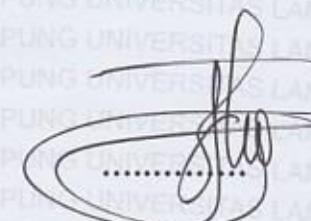


Sekretaris

: **Pigo Nauli, S.E., M.Sc.** .....



Pengudi Utama : **Dr. Trijoko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**

NIP 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Desember 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul “Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress*” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2017

Saksi Pernyataan,



Febriji Ferbienti  
NPM. 1211031123

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Lampung tepatnya di desa Krui Kampung Jawa, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 15 Juli 1993. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tua penulis, Papa bernama B. Jhon Baini, Ibu bernama Yusmidawati.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut.

1. Taman Kanak-kanak (TK) Al-Qur'an di Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2000;
2. Sekolah Dasar (SD) di SD N 1 Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2005;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2008;
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA negeri 9 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
5. Diploma III Akuntansi Universitas Lampung, lulus pada Tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Study (konversi) di perguruan tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Study S1 Akuntansi melalui non-SNMPTN. Penulis juga menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Seputih Banyak, Desa Sumber Bahagia Lampung Tengah pada tahun 2016.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, teriring doa dan rasa syukur ke hadirat Allah,

penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta tulus kepada:

### **1. Papa dan Mama Tercinta**

Papa dan Mama tercinta, yang senantiasa memberi tanpa harap, berdoa tanpa henti, mendidik dengan penuh cinta dan kasih. Semoga Allah Swt membalas setiap butir peluh dan jejak langkah Papa dan Mama dengan kebahagian di surga.

### **2. Keluargaku Tercinta**

Keluarga yang selalu menjadi motivator untuk diriku terus maju dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, khususnya Uni, Odo, Arsy, Ibu, Ayah. Terima kasih untuk segenap doa dan semangat serta senyuman indah.

### **3. Teman-teman Seperjuangan**

Teman-teman seperjuangan serta seseorang yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam Skripsi akhir ini.

### **4. Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## **MOTO**

**“BOLEH JADI KAMU MEMBENCI SESUATU, PADAHAL IA  
AMAT BAIK BAGIMU, DAN BOLEH JADI (PULA) KAMU  
MENYUKAI SESUATU, PADAHAL IA AMAT BURUK BAGIMU,  
ALLAH MENGETAHUI, SEDANG KAMU TIDAK”.**

**(Qs. AL BAQARAH: 216).**

**“TERKDANG APA YANG ANDA INGINKAN TIDAK SELALU  
ANDA DAPATKAN, TETAPI PADA AKHIRNYA APA YANG  
ANDA DAPATKAN JAUH LEBIH BAIK DARIPADA APA YANG  
ANDA INGINKAN”**

**(FEBMI FERBIENTI)**

## **SANWACANA**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terkait penyelesaian Skripsi ini.

Skripsi berjudul **“Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress*”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi, yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan selama ini;

4. Drs. A. Zubaidi Indra., M.M., C.P.A., C.A., Ak. Selaku Dosen Pembimbing 1 dari awal skripsi sampai saat penulis melaksanakan sidang kompre; dan Pigo Nauli, S.E., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing 2; atas bimbingan dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi;
5. Dr. Trijoko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembahas. Atas semua saran dan masukannya selama penulis menyusun skripsi;
6. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., dan Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen Pendadaran. Terimakasih atas semua motivasi, masukan, serta pembelajaran yang telah diberikan.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Jurusan S1 Akuntansi, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Papa dan Mama tercinta yang senantiasa memberi tanpa harap, berdoa tanpa henti, mendidik dengan penuh cinta dan kasih. Semoga Allah Swt membalas setiap butir peluh dan jejak langkah Papa dan Mama dengan kebahagian di surga;
9. Keluarga tercinta khususnya Uni, Odo, ibu, Arsy, dan Ayah yang telah menjadi semangat dan motivasi dalam sebuah arti hidup;
10. Teman-teman seperjuangan saat penulis melaksanakan perkuliahan khususnya anak S1 Akuntansi Konversi 2015. Terima kasih telah menciptakan tangis dan tawa kebersamaan yg sangat berkesan dan memberikan begitu banyak pengalaman serta pelajaran;

11. Teman-teman seperjuangan Yuninda Baper, Marisa 1T, Rifa tulus, Nova metal, Wiwid ratu petir, diahayu model MUA, Rinda Saiank, Puri Sexy, novelin aktivis, melly kalem, Dedi, Nyoman, Julfikar, Siti Amelia, Terima kasih secara tulus atas persahabatan, doa, serta kebersamaan yang teman-teman berikan. Saling memotivasi, saling berbagi, saling peduli, menciptakan kebersamaan yang penuh kekeluargaan dan kebahagian;
12. Untuk Anisa Yunisari, Ana Mei Rafika, dan Disti Isna yang selalu memberikan keceriaan, walaupun kadang suka ribut tp saling mendoakan.
13. Untuk Ayuk Mia Melita Sari, yang selalu menguatkan dalam hal apapun mau seneng mau sedih. Terimakasih banyak.
14. Risol Jaya yang selalu dihati, Dewi, Dian, Ara, Mijar, Ari. Sukses selalu untuk kita.
15. Teman SMA ku Dian dije, Rafika, Nita, Febriyana, Yossy, dan Ipit yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
16. Teman SMP ku Heizlan, Farid, dan khairil yang hingga sekarang masih terjalin hangat, selalu memberikan banyak keceriaan serta motivasi;
17. Teman kecilku Elvi Yana yang menjadi motivasi untuk terus maju;
18. Untuk mbae, Ersanti Anggunan Dewi yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu mendukung dalam pencapaian skripsi ini;
19. Untuk AWS, yang selalu berusaha ngertiin mimi yang selalu maunya dingertiin hehe. Thanks so much and more.
20. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini serta semua

semua yang selalu doain mimi yang mimi tau dan yang tidak mimi tau,  
makasih banyak.

Semoga bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi.

Penulis, Desember 2017

Febmi Ferbienti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN JUDUL .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTO .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Agency Theory.....	9
2.2 Financial Distress .....	11
2.3 Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .....	14
2.3.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	16
2.3.2 <i>Good Corporate Governance (GCG) Score</i> .....	18

2.4 Kepemilikan Institusional .....	19
2.5 Penelitian Terdahulu .....	21
2.6 Pengembangan Hipotesis .....	23
2.6.1 Ukuran Dewan Komisaris dan <i>Financial Distress</i> .....	23
2.6.2 Kepemilikan Institusional dan <i>financial Distress</i> .....	25
2.6.3 Ukuran Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> .....	26
2.6.4 Frekuensi Rapat Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> .....	28
2.7 Kerangka Pemikiran .....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian .....	31
3.2 Operasional Variabel.....	32
3.2.1 Variabel Dependen .....	32
3.2.2 Variabel Independen .....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
3.3.1 Metode Pengumpulan Data .....	36
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	36
3.5 Teknik Analisis .....	37
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	37
3.5.2 Uji Normalitas .....	37
3.5.3 Uji Hipotesis .....	37

### BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	39
4.2 Analisis Data .....	40
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	40
4.2.2 Uji Normalitas .....	44
4.2.3 Hasil dan Pembahasan Uji univariate .....	47
4.2.4 Menguji Kelayakan Model Regresi Logistik (Overs Fit Model) .....	49
4.2.5 Hasil dan Pembahasan Uji Variat Berganda ( <i>Multivariate</i> )	51

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	59
5.3 Saran.....	60

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
4.1 Prosedur Pemilihan Sampel .....	40
4.2 Hasil Statistik Perusahaan <i>Non-Distress</i> .....	41
4.3 Hasil Statistik Perusahaan <i>Distress</i> .....	41
4.4 Hasil Uji Normalitas Perusahaan <i>Non-Distress</i> .....	44
4.5 Hasil Uji Normalitas Perusahaan <i>Distress</i> .....	45
4.6 Uji beda Wilcoxon Variabel <i>Non-Distress</i> .....	47
4.7 Uji beda Wilcoxon Variabel <i>Distress</i> .....	48
4.8 Gambaran Jumlah Kasus Penelitian .....	50
4.9 nilai -2 Log Likelihood, <i>cox and snaill's</i> dan <i>Negelkeke;s R Square</i> .....	50
4.10 Hasil Pengujian <i>Multivariate</i> .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN**

1. Daftar Perusahaan yang Menjadi Sempel Penelitian
2. Daftar Perusahaan yang Tidak Mengalami *Financial Distress*
3. Daftar Perusahaan yang Mengalami *Financial Distress*
4. Daftar Tabulasi Variabel Distress-nondistress
5. Uji Statistik Deskriptif
6. Uji Normalitas
7. Nilai -2 Log Likelihood, *Cox And Snaill's* Dan *Negelkeke; S R Square*
8. Uji Hipotesis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Aspek penting dalam menganalisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kelangsungan usaha perusahaan sehingga manajer atau pengguna laporan keuangan mampu memprediksi kondisi *financial distress*. *Financial distress* perusahaan mengacu pada situasi dimana arus kas perusahaan tidak dapat menggantikan aktiva bersih negatif dari perusahaan tersebut (Geng, Bose, & Xi, 2014). Secara umum telah disepakati bahwa kegagalan keuangan menyebabkan melemahnya profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, *financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang mungkin berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan seperti resiko kebangkrutan.

Memprediksi *financial distress* telah menjadi topik yang menarik selama beberapa dekade terakhir karena hal tersebut penting untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek, pemangku kepentingan dan bahkan kondisi perekonomian suatu negara (Wanke & Faria, 2014). Jika prediksi *financial distress* dapat diandalkan, maka manajer perusahaan dapat melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menghindari resiko sebelum krisis tersebut terjadi dan investor dapat memahami situasi profitabilitas perusahaan dan menyesuaikan strategi investasi

mereka untuk mengurangi kerugian terkait investasi. Namun, perkembangan pesat dari pasar modal dan integrasi ekonomi global telah meningkatkan jumlah perusahaan yang menderita kesulitan keuangan selama bertahun-tahun (Geng et al., 2014).

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sedang berada dalam zona yang cukup mengkhawatirkan akibat adanya *currency war*. Nilai tukar rupiah mencapai angka Rp13.480 pada Januari 2017, melemahnya nilai tukar rupiah ini dapat berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan di Indonesia jika perusahaan tidak bisa mengatasi kondisi ini (Gideon, 2017). Kesulitan keuangan juga dapat kita lihat dari faktor penerapan mekanisme *corporate governance* yang dilakukan. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998 akibat melemahnya nilai tukar rupiah, dimana nilai tukar rupiah pada tahun 1998 mencapai angka Rp17.000 per dollar Amerika Serikat. Hal tersebut tidak lain akibat buruknya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada saat itu. Kasus lainnya mengenai bangkrutnya perusahaan besar dunia karena mengalami *financial distress* akibat buruknya penerapan *corporate governance* antara lain, bangkrutnya Enron pada tahun 2001 dan *WorldCom* pada tahun 2002 akibat manipulasi laporan keuangan yang dilakukan hingga menyebabkan dibubarkannya perusahaan audit Arthur Andersen yang merupakan auditor mereka pada saat itu. Kedua kasus tersebut menjadi tonggak dari perkembangan penerapan *good corporate governance*.

Dalam mencapai tujuannya perusahaan mengalami *agency problem* yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham atau pemilik perusahaan, dimana manajer akan berusaha untuk meningkatkan kepentingan pribadi

sedangkan pemegang saham mementingkan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai, namun *agency problem* yang muncul tergantung pada struktur perusahaan. Menurut Porta, Lopez-de-Silane, dan Shleifer (1999) bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia merupakan struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana didominasi oleh perusahaan kepemilikan keluarga. Pemegang saham mayoritas dapat memegang kendali atas pengambilan keputusan oleh manajemen dan cenderung kurang dalam hal perlindungan hak pemegang saham minoritas. Sehingga *agency problem* yang muncul di Indonesia lebih kepada konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang memicu timbulnya *agency cost* yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Timbulnya *agency cost* berimplikasi pada proses pengawasan dan mekanisme insentif yang harus dilakukan serta penerapan *corporate governance* yang baik.

Miglani, Ahmed, dan Hendry (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mempertahankan rendahnya *agency cost* kemungkinan kecil tidak akan mengalami *financial distress*. Selain itu, telah diungkapkan oleh beberapa studi sebelumnya bahwa penerapan *corporate governance* yang baik mampu memitigasi adanya *agency cost*. Semakin baik struktur *corporate governance* suatu perusahaan maka semakin rendah *agency cost*, begitu juga dengan kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan tersebut. Struktur dewan komisaris, struktur kepemilikan saham, dan komite audit berperan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan demi keuntungan pemegang

saham atau pemilik serta memastikan adanya perlakuan yang setara antara pemegang saham utama dan minoritas, sehingga mampu mengurangi *agency cost* yang muncul.

Indonesia menganut sistem *two-tier board* dimana terdapat pemisahan antara tugas pengelolaan dan pengawasan. Dewan direksi bertugas melakukan pengelolaan perusahaan sedangkan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi tersebut. Baik fungsi Direksi dan Komisaris diatur dalam undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bapepam-LK No IX.I.6. Selain itu, Otoritas Jasa keuangan dalam peraturan No. 33/POJK.04/2012 juga mengatur mengenai pembentukan dewan komisaris dan komisaris independen. Adanya peraturan-peraturan tersebut maka keberadaan dewan komisaris dan komisaris independen bersifat mandatory di Indonesia.

Masalah tentang keagenan biasanya berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan yang bersangkutan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga potensi terjadinya kesulitan keuangan dapat diminimalisir karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pernyataan ini didukung dengan hasil

penelitian Emrinaldi dalam penelitian (Triwahyuningtias dan Muharam 2012) yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan.

Sedangkan komite audit merupakan salah satu struktur *corporate governance* yang juga menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit yang efektif akan berfokus untuk memaksimalisasi kekayaan pemegang saham dan mengawasi manajer untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadinya, sehingga dapat memitigasi *adanya agency problem* (Wathne & Heide, 2000). Oleh sebab itu, efektifitas komite audit dapat dikatakan berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress* suatu perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Simpson dan Gleason (1999) bahwa kurangnya kompetensi dari anggota komite audit berkontribusi pada kesulitan keuangan perusahaan. Di sisi lain, kompetensi komite audit memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan (McMullen & Raghunandan, 1996).

Di Indonesia sendiri terdapat Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif yang dikeluarkan pada bulan Mei 2002 dan berbagai peraturan yang mengharuskan setiap perusahaan wajib memiliki komite audit diantaranya adalah (1) Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000, yang merekomendasikan perusahaan- perusahaan publik memiliki komite audit, (2) KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit, (3) KEP-117/M-MBU/2002 dan KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN di Indonesia mempunyai komite audit. Selain itu, terdapat peraturan Bapepam-LK

Nomor IX.I.5 yang mengatur mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adanya peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa keberadaan komite audit bersifat mandatory di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu menguji hubungan berbagai macam struktur *corporate governance* dan *financial distress* suatu perusahaan antara lain: Elloumi dan Gueyle (2001) menguji hubungan antara *outside director*, kepemilikan saham *outside director* dan *CEO chair-duality*, dengan kemungkinan terjadinya *financial distress* di Kanada. Mereka menemukan bahwa *outside director* dan kepemilikan *outside director* memiliki hubungan yang negatif terhadap kemungkinan *financial distress*. Sedangkan *CEO duality* gagal menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*. Selain itu, Wardhani (2006) juga menguji hubungan struktur *corporate governance* dan *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan periode laporan keuangan tahun 1999 sampai dengan 2014. Struktur *corporate governance* diprosikan dengan ukuran dewan, independensi dewan, *turnover* direksi, dan struktur kepemilikan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan komisaris serta *turnover* direksi memiliki hubungan yang signifikan terhadap probabilitas *financial distress*, sedangkan independensi dewan dan struktur kepemilikan tidak memiliki hubungan terhadap kemungkinan *financial distress*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur *corporate governance* terhadap probabilitas *financial distress* perusahaan khususnya dalam memitigasi dampak *agency problem* yang terjadi. Penelitian ini lebih spesifik pada organ-organ

perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan sehingga struktur *corporate governance* diprosikan oleh struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit dimana penggunaan karakteristik komite audit sebagai variabel independen terkait dengan fungsi pengawasan internal perusahaan yang dilakukan belum banyak ditemukan di Indonesia.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah dengan diwajibkannya setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk membentuk dewan komisaris dan komite audit efektif dalam mengurangi *agency problem* yang terjadi pada suatu perusahaan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada para agen bisnis akan pentingnya penerapan *corporate governance* serta fungsi pengawasan yang baik untuk menghindari kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh struktur dewan komisaris terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*?
3. Bagaimana pengaruh karakteristik komite audit terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara struktur dewan komisaris dengan probabilitas *financial distress* perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan intitusional dengan probabilitas *financial distress* perusahaan
3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit dengan probabilitas *financial distress* perusahaan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Agency Theory***

Dalam menganalisis dan menjelaskan tentang *corporate governance* terdapat kerangka teori dari perspektif yang berbeda, salah satunya adalah *agency theory*. *Agency theory* merupakan kerangka teori yang timbul dari perspektif ekonomi dan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) dan Ross (1973) mengatakan bahwa *agency relationship* adalah hubungan dimana pemegang saham selaku pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen atau manajemen yang mereka sewa (bayar) untuk mewakili kepentingan mereka. Mekanisme tersebut menimbulkan adanya pemisahan antara pihak yang melakukan pengawasan dan pihak yang mengelola perusahaan yang kemudian memicu adanya *agency problem*. *Agency problem* muncul ketika agen sebagai pengelola perusahaan tidak melakukan pengambilan keputusan yang benar-benar mewakili para pemegang saham. Dalam teori keuangan disebutkan bahwa tujuan dasar dari perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan pada praktiknya, sebagian besar agen lebih mementingkan kesejahteraan mereka pribadi, seperti mendapatkan bonus sebesar mungkin.

*Agency problem* memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada perusahaan. Dampak langsung adanya *agency problem* ini berupa biaya-biaya yang hanya menguntungkan manajemen tanpa ada manfaatnya bagi pemegang saham misalnya, biaya akomodasi manajemen seperti rumah dan mobil mewah, atau pembayaran bonus tanpa melihat performa perusahaan. Sedangkan dampak tidak langsung akibat adanya *agency problem* ini adalah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi-investasi yang dapat mereka lakukan, hal ini dikarenakan manajemen cenderung tidak berani untuk melakukan investasi karena takut untuk mengambil risiko investasi yang dapat merugikan kepentingan pribadi manajemen itu sendiri (Wasterfield & Jordan, 2011).

Adanya *agency problem* ini membuat pemegang saham harus memiliki kontrol terhadap para agen mereka untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Untuk itu, timbul *agency cost* atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memitigasi adanya *agency problem*. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau bonus dalam bentuk *non-cash* seperti opsi saham kepada manajemen dan karyawan, dengan adanya insentif berupa kepemilikan saham tersebut, dapat memaksa manajemen dan karyawan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis *agency cost*, antara lain:

### 1. *Monitoring Cost*

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemegang saham untuk memastikan bahwa manajemen tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan pemegang saham seperti pemberian insentif atau remunerasi kepada para manajemen.

### 2. *Bonding Cost*

Merupakan biaya yang dikeluarkan agen untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Contohnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan laporan keuangan dan informasi terkait lainnya sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemilik

### 3. *Residual cost*

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan akibat tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

## **2.2 *Financial Distress***

*Financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan kesulitan dalam membayar kewajiban jatuh tempo mereka kepada kreditor (Beaver, Correia, & McNichols, 2011), sementara Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan yang mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum kebangkrutan terjadi ataupun likuidasi. Oleh sebab itu, *financial distress* dapat dikatakan sebagai kondisi yang mengawali perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Meningkatnya

*financial distress* dapat terjadi akibat tingginya *fixed cost* perusahaan, aset perusahaan dalam keadaan tidak lancar, atau pendapatan yang sensitif terhadap resesi ekonomi (Khalid *et al.*, 2014). Kondisi perekonomian suatu negara juga dapat mempengaruhi tingginya tingkat kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* sebagaimana telah banyak diketahui bahwa krisis ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan banyak bank yang dilikuidasi, kemudian disusul adanya krisis ekonomi global pada tahun 2008 juga membuktikan bahwa kesulitan keuangan mampu menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Kondisi *financial distress* menjadi suatu kondisi yang dapat mengurangi nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang telah diprediksi akan mengalami *financial distress* membuat investor tidak tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan akan turun. Dengan begitu, perusahaan akan kesulitan dalam mendapatkan modal baik dari investor maupun dari kreditor. Untuk itu, penting dalam dunia usaha dalam memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress* suatu perusahaan.

*Financial distress* merupakan situasi dimana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang dapat dijelaskan dalam empat situasi berikut (Geng, Bose, & Xi, 2014):

1. *Bankruptcy*

Kondisi dimana perusahaan memiliki negatif *stockholder equity*, yang membuat perusahaan tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor

sebelum perusahaan dilikuidasi. Altman (1993) dan Zmijewski (1984) mendefinisikan *bankruptcy* adalah suatu situasi yang secara legal membuktikan bahwa perusahaan telah mengalami *financial distress*. Perusahaan belum dinyatakan bangkrut sebelum membuat pernyataan kebangkrutan sesuai peraturan yang berlaku.

#### 2. *Failure*

Situasi dimana perusahaan tidak mampu membayar *lenders*, *preferred stock shareholders*, *suppliers*, dan lain-lainnya (Geng *et al.*, 2014). Sedangkan Altman (1993) mendefinisikan *failure* sebagai sebuah situasi dimana *rate of return* perusahaan lebih rendah daripada *rate of return* investasi sejenis yang berlaku di pasar.

#### 3. *Insolvency*

Situasi dimana perusahaan mengalami masalah likuiditas atau kesulitan dalam membayar hutang yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan terlalu banyak melakukan pendanaan melalui hutang (*debt*). *Insolvency* juga mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang buruk atau *negative networth*.

#### 4. *Default*

Situasi dimana perusahaan melanggar perjanjian hutang dengan kreditor, contohnya perusahaan terlambat dalam membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini, perusahaan belum tentu tidak mampu membayar hutang tersebut sehingga belum tentu mengarah pada kondisi bangkrut. Hal

ini dapat diperbaiki dengan melakukan negosiasi ulang dengan pihak kreditor seperti mekanisme restrukturisasi atau *rescheduling* hutang.

### **2.3 Mekanisme *Corporate Governance***

Titik balik yang sangat menentukan untuk perkembangan praktik *good corporate governance* (GCG) di seluruh dunia adalah pada saat *Cadbury Committee* memperkenalkan istilah *corporate governance* pertama kali pada tahun 1992 (Tjager,2003). *Cadbury Committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. (dialihbahasakan oleh penulis)

Sedangkan *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD, 2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Struktur dimana para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut serta pengawasan terhadap kinerja. (dialihbahasakan oleh penulis).

Dari kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem, aturan atau proses yang mengatur hubungan antara organ dalam perusahaan yaitu manajer, pemegang saham, direksi, komisaris, dan *stakeholder* lainnya demi pencapaian tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai

perusahaan. Dengan menerapkan GCG perusahaan dapat terhindar dari risiko-risiko bisnis yang mampu merugikan perusahaan dan bahkan membantu suatu Negara terhindar dari risiko krisis global. Mekanisme *corporate governance* menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan perusahaan demi kepentingan *stakeholder* dan para pemegang saham bukan untuk kepentingan pribadi individu dan dalam hal ini diperlu fungsi pengawasan internal yang baik dalam perusahaan. Hal tersebut dapat dicapai jika perusahaan menjalankan prinsip-prinsip *corporate governance* yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal *corporate governance*. Mekanisme internal meliputi organ dalam perusahaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan yaitu pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris beserta perangkat yang dibentuknya. Sedangkan mekanisme eksternal *corporate governance* meliputi organ-organ luar perusahaan yang juga mempengaruhi pengelolaan perusahaan seperti regulasi, kondisi perekonomian, atau pasar modal.

Sistem *corporate governance* di setiap negara berbeda tergantung pada tradisi budaya, sejarah, rerangka hukum, praktik bisnis, kebijakan, dan lingkungan ekonomik-institusional di mana sistem-sistem tersebut berkembang (Tjager, 2003). Perbedaan yang paling terlihat adalah pada struktur dewan perusahaan. terdapat dua jenis struktur dewan yang berlaku, yaitu:

### 1. *One-tier board system*

*One-tier system* atau *unitary board* merupakan sistem dimana baik eksekutif dan komisaris perusahaan berada pada posisi yang setara. Dalam *unitary board* tidak dipisahkan antara fungsi manajemen dan fungsi pengawasan sehingga dapat timbul mekanisme *CEO-duality* dimana presiden direktur juga menempati posisi komisaris. *Unitary board* biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*.

### 2. *Two-tier board system*

*Two-tier Board system* merupakan sistem yang memisahkan fungsi pengawasan dan manajemen perusahaan. Pada sistem ini presiden direktur tidak satu posisi dengan komisaris sebagai fungsi pengawasan. Manajemen fokus pada operasional perusahaan dan dipimpin oleh CEO sedangkan dewan komisaris atau *supervisory board* yang melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

#### **2.3.1 Prinsip *Good Corporate Governance***

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance*, Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) yang merupakan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diadaptasi dari prinsip-prinsip *corporate governance* menurut OECD. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kewajaran (*Fairness*)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham minoritas dan mayoritas untuk mencegah terjadinya insider trading, self dealing, atau konflik kepentingan lainnya dengan membuat aturan yang melindungi pemegang saham minoritas.

2. Transparansi (*Disclosure dan Transparency*)

Perusahaan harus melakukan pengungkapan yang akurat, tepat waktu dan transparan untuk semua hal penting mengenai perusahaan. Perusahaan tidak hanya melakukan pengungkapan masalah yang hanya diisyaratkan perundang- undangan tetapi juga hal-hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*)

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

5. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain dan tidak terpengaruh pada kepentingan tertentu sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan secara objektif.

Masing-masing organ perusahaan juga harus menjalankan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan sehingga tidak timbul dominasi atau saling lempar tanggung jawab satu sama lainnya.

### ***2.3.2 Good Corporate Governance (GCG) Score***

*Good corporate governance* diprosikan oleh 3 hal yaitu komite audit, dewan komisaris, serta struktur kepemilikan.

#### **1. Komite Audit**

Menurut revisi peraturan nomor IX.I.5 Bapepam LK (2011), komite audit adalah komite yang dibentuk dan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah komite audit setidaknya ada 3 orang. Selain itu salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

#### **2. Dewan Komisaris**

(FCGI, 2001) dewan komisaris dalam GCG bertujuan untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi pihak-pihak ketiga. Anggota komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Muntoro (2007) mengungkapkan jumlah dewan komisaris paling tidak harus sama dengan dewan direksi. Keputusan Direksi BEJ Peraturan Pencatatan Efek No 1-A

menyebutkan bahwa komposisi dewan komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris.

### 3. Struktur Kepemilikan

(Haryono, 2005) struktur kepemilikan merupakan proporsi antara kepemilikan manajerial (*inside* dan kepemilikan institusional (*outside*)). Menurut Soesetio (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Pihak institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik daripada pihak manajerial dikarenakan pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer. Selain itu, Soesetio mengungkapkan pihak institusional lebih mementingkan adanya stabilitas pendapatan atau keuntungan jangka panjang sehingga aset penting perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh para manajemen di dalam perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris.

#### **2.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Wahyu Widarjo, 2010: 25). Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta, (2013: 3407), kepemilikan

institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Pernyataan ini sejalan dengan Crutchly et al. (1999) dalam Widyantini (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan hal ini dapat mengurangi biaya keagenan.

Dengan adanya institusional ownership, monitoring atas perusahaan akan meningkat. Hal ini diakibatkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh information channel yang lebih baik dibandingkan kepemilikan saham oleh individu. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Moh. Iskandar dan Saleh (2009)	<i>Audit Committee Characteristics Distresses and Non-distressed Companies</i>	Dependen (Y): • <i>Financial Distress</i>  Independen X: • <i>Audit Committee Size</i> • <i>Audit Committee Composition</i> • <i>Meeting Frequency</i> • <i>Financial Literacy</i>	Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilitas <i>financial distress</i> perusahaan.
2	Salloum, Azzi, Gabrayer (2014)	<i>Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context: Evidence of the Beninese Financial Institutions</i>	Dependen (Y): • <i>Financial Distress</i>  Independen (X): • <i>Audit Committee Size</i> • <i>Audit Committee Composition</i> • <i>Meeting Frequency</i> • <i>Financial Literacy</i>  <i>Control Variable:</i> • <i>Bank Size</i> • <i>Quality</i>	Frekuensi rapat Komite Audit, mendorong komite audit untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan serta memberikan pengawasan yang efektif terhadap operasional perusahaan.
3	Miglani, Ahmed, dan Henry	<i>Voluntary Corporate Governance</i>	Dependen (Y): • <i>Financial Distress</i>	Perusahaan yang mempertahanka

	(2015)	<i>Structure and Financial Distress: Evidence From Australia</i>	Independen (X): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Blockholder Ownership</i></li> <li>• <i>Director Ownership</i></li> <li>• <i>Audit Committee</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Size</i></li> <li>• <i>Big 4</i></li> </ul>	n rendahnya <i>agency cost</i> kemungkinan kecil tidak akan mengalami <i>financial distress</i>
4	Manzaneque , Priego, dan Merino (2015)	<i>Corporate Governance Effect on Financial Distress likelihood: Evidence from Spain</i>	Dependen (Y): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul> Independen (X): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Profitability</i></li> <li>• <i>Financial expenses</i></li> <li>• <i>Retained earnings</i></li> <li>• <i>Ownership concentration</i></li> <li>• <i>Institutional ownership</i></li> <li>• <i>Non-institutional ownership</i></li> <li>• <i>Board ownership</i></li> </ul> Independen directors: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Board size</i></li> <li>• <i>Match variables</i></li> <li>• <i>Firm size</i></li> <li>• <i>Industry</i></li> </ul>	kepemilikan dewan, proporsi dewan independen dan ukuran dewan mampu mengurangi adanya kondisi <i>financial distress</i> . Semakin tinggi kepemilikan dewan, proporsi dewan independen dan jumlah dewan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> .
5	Pembayun dan Januarti (2012)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	Dependen (Y): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul> Independen (X):	Ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Komite Audit</li> <li>• Komite Audit Independen</li> <li>• Frekuensi Pertemuan Komite Audit</li> <li>• Kompetensi Komite Audit</li> </ul> <p>Variable Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Perusahaan</li> </ul>	<p>negatif terhadap <i>financial distress</i>. Sedangkan komite audit dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>financial dstress</i>.</p>
6	Ariesta dan Chairiri (2013)	Analisis Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan Saham dan Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	<p>Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financial Distress</i></li> </ul> <p>Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi Komisaris Indpenden</li> <li>• Kepemilikan Saham oleh direksi</li> <li>• Kepemilikan saham oleh komisaris</li> <li>• Kepemilikan Saham Outsider</li> <li>• Independensi Komite Audit</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> </ul>	<p>Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>. Ini berarti Independensi komite audit dapat membantu perusahaan menghindari <i>financial distress</i>.</p>

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1 Ukuran Dewan Komisaris dan *Financial Distress*

Berdasarkan *agency theory*, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham. Dalam undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 108 ayat 2 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No.33/POJK.04/2012 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa perusahaan wajib memiliki dewan komisaris sebagai fungsi pengawasan paling sedikit 2 (dua) orang.

Dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan perusahaan terutama dalam hal pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan (Miglani, Ahmed, & Henry, 2015). Dewan komisaris bertugas dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan sebagai konsultan dewan direksi dalam hal strategi bisnis yang akan dilakukan. Semakin baik penerapan *corporate governance* suatu perusahaan semakin rendah *agency cost* yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memitigasi adanya *agency problem*. Perusahaan yang mempertahankan rendahnya *agency cost* kemungkinan kecil tidak akan mengalami *financial distress* (Miglani, Ahmed, & Henry, 2015).

Banyaknya jumlah dewan komisaris akan meningkatkan *disciplinary control* terhadap eksekutif perusahaan (Bredart, 2014). Meningatkannya jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan juga mengindikasikan semakin meningkatnya

diversifikasi keahlian, sehingga mampu melakukan evaluasi kinerja manajemen dengan baik serta semakin banyak pula koneksi terhadap pihak eksternal yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mengatasi kondisi *financial distress*, dengan misalnya meminta bantuan terhadap pihak eksternal perusahaan, baik dalam pinjaman dana atau mekanisme lainnya yang mungkin dilakukan untuk menghindari perusahaan dari kebangkrutan. Bredart (2014) dalam penelitiannya mengenai dampak konfigurasi dewan terhadap *financial distress* dengan sampel 312 perusahaan di US yang saat ini juga sudah mengarah kepada penggunaan *two tier board system* seperti di Indonesia.

Untuk itu, semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat mengurangi adanya *agency cost* yang mampu memicu kondisi *financial distress*. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.**

### **2.6.2 Kepemilikan Institusional dan *Financial Distress***

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan

Gaughan,1991). Investor institusi turut berperan dalam mengendalikan tindakan manajemen sehingga manajemen akan bersikap hati-hati dalam menjalankan usahanya dan akan memilih peluang investasi yang positif (Munthe, 2008:279). Dengan semakin tingginya pengawasan yang dilakukan serta menurunnya biaya keagenan yang dikeluarkan, maka kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan yang dapat mengakibatkan kondisi *financial distress* akan semakin kecil. Teori diatas menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara financial distress dengan kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kinerja perusahaan dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan. Sedangkan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, karena mereka yang memonitor manajemen sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional semakin tinggi dan membuat manajemen memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Jadi terdapat indikasi bahwa *financial distress* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

### **2.6.3 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress***

Komite audit merupakan salah satu mekanisme internal kontrol perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan akan diketuai oleh komisaris independen. Setiap anggota komite audit harus bersikap independen, objektif, profesional, memahami operasional perusahaan, memahami risiko dan lingkungan bisnis perusahaan serta paling sedikitnya satu orang anggotanya harus memiliki pemahaman mengenai

pelaporan keuangan. Komite audit membantu dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Hasil penelitian mengenai hubungan antara ukuran komite audit dan probabilitas komite audit belum konsisten. Rahmat dan Iskandar (2009) dan Salloum, Azzi, dan Gebrayel (2014) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress*. Namun, dalam konteks pengawasan, besarnya jumlah anggota komite audit dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan kualitas laporan keuangan karena lebih banyak anggota yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang tersebut sehingga mampu mencegah perusahaan ke dalam kondisi *financial distress*. Sebagaimana yang dikemukakan Abdullah dan Hussin (2009) bahwa besarnya jumlah komite audit meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

Pengawasan terhadap laporan keuangan, mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi laporan keuangan ke publik semakin meningkat. Hal tersebut akan mengurangi tingkat terjadinya *fraud* yang dapat mengarah kepada kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis ke empat yang dibentuk adalah sebagai berikut:

**H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial Distress***

#### **2.6.4 Frekuensi Rapat Komite Audit dan *Financial Distress***

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015, pasal 13 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit paling kurang harus mengadakan rapat satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit merupakan pengukuran terhadap aktivitas komite audit (Abbott, Parker, & Peters, 2004). Frekuensi rapat komite audit memainkan peranan penting dalam efektivitas audit dan kualitas kontrol perusahaan karena dengan adanya rapat meningkatkan interaksi dan komunikasi anggota komite audit.

Dengan demikian, frekuensi rapat komite audit juga mengindikasikan rendahnya risiko audit yang diperoleh perusahaan (Stewart & Munro, 2007). Rapat tidak hanya dilakukan antar sesama anggota komite audit, rapat juga diadakan untuk menjalin interaksi antara anggota komite audit dengan direksi serta komite audit dengan internal dan eksternal audit perusahaan. Melalui rapat, mereka dapat mengetahui risiko bisnis perusahaan serta tindak lanjut dari temuan audit yang ada untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Salloum, Azzi, dan Gebrayel (2014) menemukan bukti empiris bahwa frekuensi rapat Komite Audit memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Dengan banyaknya rapat yang diadakan, mendorong komite audit untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan serta memberikan pengawasan yang efektif terhadap operasional perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis terakhir yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

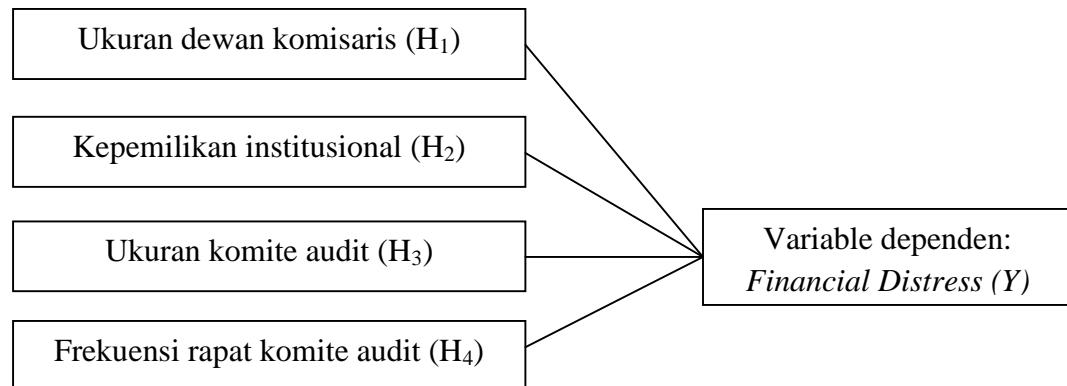
**H4 : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress.***

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Penerapan *corporate governance* yang buruk mampu mendorong perusahaan pada kondisi *financial distress* yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan antara berbagai macam variabel *corporate governance* dan *financial distress* masih terdapat bias. Hal ini dikarenakan penerapan *corporate governance* di setiap Negara berbeda tergantung pada budaya dan regulasi yang berlaku di Negara tersebut.

Fokus pada penelitian ini adalah mekanisme pengawasan yang tinggi terhadap kinerja perusahaan dan manajemen yang mengalami *agency problem* sehingga mampu menurunkan probabilitas *financial distress*. Untuk itu, variabel *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit yang merupakan organ-organ yang berfungsi dalam hal pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Model Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit yang merupakan organ-organ yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Model yang digunakan dari penelitian ini mengacu pada model penelitian Miglani, Ahmed, dan Henry (2015) dan Salloum, Azzi, dan Gebrayel (2014) dengan satu tambahan variabel independen, yaitu jumlah dewan komisaris independen. Kepemilikan institusional (INST), sedangkan untuk variabel karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jumlah komite audit (ACSIZE), komposisi komite audit (ACCOMP), dan frekuensi rapat komite audit (ACMEET) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Salloum, Azzi dan Gebrayel (2014) dan Rahmat dan Iskandar (2009), yang menggunakan model Zmijewski sebagai pengukuran atas variabel dependennya yaitu *financial distress* sehingga model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$DISTRESS_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 COMM_{it} + \alpha_2 INST_{it} + \alpha_3 ACSIZE_{it} + \alpha_4 ACMEET_{it} + \alpha_5 \epsilon_{it}$$

Dimana:

DISTRESS <sub>it</sub>	: nilai 1 jika perusahaan digolongkan sebagai <i>financial distress</i> , 0 jika perusahaan non <i>financial distress</i>
COMM <sub>it</sub>	: Jumlah anggota Dewan Komisaris
INST <sub>it</sub>	: Persentase total saham yang dimiliki oleh pemegang saham Institusional terhadap saham beredar
ACSIZE <sub>it</sub>	: Jumlah anggota Komite Audit
ACMEET <sub>it</sub>	: Jumlah rapat yang diadakan dalam satu tahun.
$\varepsilon_{it}$	: <i>error</i>

### 3.2 Operasional Variabel

#### 3.2.1 Variabel Dependend

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. Pada penelitian ini, untuk mengidentifikasi perusahaan mengalami *financial distress* menggunakan Model Zmijewski mengacu pada penelitian Miglani 2014. Zmijewski (1984) menggunakan *probit analysis* pada 40 perusahaan bangkrut dan 800 perusahaan yang masih beroperasi dengan baik dan membuat model prediksi kebangkrutan menggunakan ROA, *Leverage* dan *Liquidity ratio*. Model Zmijewski paling cocok digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan karena berdasarkan sampel yang digunakan, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung memiliki masalah *leverage*.

$$ZFS = -4,336 - 4,513 (X_1) + 5,679 (X_2) - 0,004 (X_3)$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Return On Asset}$

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

ROA mengukur keberhasilan manajemen menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, atau perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva guna mengukur tingkat pengembalian investasi total.

$X_2 = \text{Leverage}$

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban mereka dengan setiap aset yang dimiliki. Perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi memiliki kemungkinan besar mengalami *financial distress*.

$X_3 = \text{Current Ratio}$

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

*Current ratio* adalah salah satu ukuran likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. *Current ratio* dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* sering disebut dengan rasio modal kerja yang menunjukkan jumlah aktiva lancar yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan

untuk merespon kebutuhan-kebutuhan bisnis dan meneruskan kegiatan bisnis hariannya.

*Cut off* yang berlaku pada model zmijewski adalah 0. Artinya, jika perusahaan memiliki skor lebih besar dari atau sama dengan 0, maka perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami *financial distress* dimasa depan. Namun, jika nilai skor perusahaan kurang dari 0 maka perusahaan tersebut diprediksi tidak akan mengalami *financial distress*.

### **3.2.2 Variabel Independen**

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan instiusional, dan komite audit. Informasi mengenai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

#### a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Informasi mengenai jumlah Dewan Komisaris dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

(Salloum & Azoury, 2012 dan Fisck & Slezak, 2007)

#### b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham dalam suatu perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan sebagainya. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi *financial distress*. Diprosikan dengan proporsi kepemilikan institusional terhadap jumlah saham beredar.

c. Ukuran Komite Audit

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendelegasikan tugas Dewan Komisaris. Ukuran Komite Audit merupakan total anggota Komite Audit dalam perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Informasi mengenai jumlah Komite Audit dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. (Rahmat, Iskandar & Saleh, 2009; Salloum, Azzi, & Gebrayel, 2014)

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat Komite Audit adalah jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam satu tahun. (Rahmat, Iskandar & Saleh, 2009; Salloum, Azzi, & Gebrayel, 2014).

### **3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi yang tersedia, di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tahunan digunakan untuk mencari data mengenai jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan data mengenai komite audit yang merupakan variabel independen dari penelitian ini.

### **3.4 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013–2015, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015
2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dikeluarkan dari sampel
3. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang tidak lengkap, maka dikeluarkan dari sampel
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk Rupiah.

### **3.5 Teknik Analisis**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum.

*Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel (Ghozali,2012). Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

#### **3.5.3 Uji normalitas**

Uji normlaitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*.

#### **3.5.5 Uji hipotesis**

1. Uji Univariate, menurut Ghozali (2011) bahwa pengujian regresi logistic umumnya digunakan jika asumsi multivariate normal distribution tidak terpenuhi, sedangkan untuk uji beda apabila data tidak normal dapat menggunakan uji Z, dan dalam penelitian ini menggunakan Wilcoxon.
2. Uji multivariate dengan menggunakan regresi logistic (*logistic regression*) yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Analisis hipotesis dengan menggunakan regresi logit dapat digunakan apabila variabel dependen dan variabel independennya campuran variabel metric dan non metric. Regresi logit tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel independennya (Ghozali, 2011).

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur dewan komisaris yang diproksikan melalui jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional dan karakteristik komite audit yang diproksikan melalui jumlah komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Salah satu penyebab adanya *financial distress* adalah adanya *agency problem* yang timbul antara kepentingan pemilik dan kepentingan manajemen yang menyebabkan timbulnya *agency cost*. Untuk memitigasi adanya *agency cost*, diperlukan tingkat pengawasan yang baik. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) Ver. 23. Sampel penelitian ini adalah 174 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2013-2015. 16 perusahaan termasuk dalam kategori *financial distress (distress firm)* berdasarkan model Zmijewski dan sisanya 158 perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan sehat (*non-distress firm*). Setelah dilakukan pengujian hipotesis, berikut beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum:

1. Berdasarkan hasil uji *multivarite* menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Keberadaan dewan komisaris belum mampu menjadi suatu mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.
2. Berdasarkan hasil *multivarite* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang dinilai sebagai mekanisme pengawasan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh institusional belum bisa menjadi pengawasan yang mampu memitigasi probabilitas *financial distress* perusahaan. Dalam hal ini dapat kita simpulkan pula bahwa kepemilikan institusional di Indonesia belum mampu berpengaruh terhadap upaya untuk mengurangi dampak *agency problem* yang timbul.
3. Berdasarkan hasil uji *multivarite* menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Keberadaan komite audit juga bersifat *mandatory* dimana keberadaannya menjadi suatu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang ingin *listed* di BEI dengan minimal jumlah anggota komite audit 3 orang. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* mengindikasikan bahwa

keberadaannya hanya bersifat formalitas dan belum dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan internal untuk memitigasi terjadinya *agency problem*.

4. Berdasarkan hasil uji *multivarite* menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hasil ini mendukung argumen peneliti bahwa semakin banyak rapat yang diadakan mendorong komite audit untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas internal operasional perusahaan. Dengan adanya rapat setiap permasalahan operasional maupun keuangan segera dapat di atasi sehingga mampu mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini hanya memakai struktur dewan komisaris dengan ukuran dewan komisaris saja, kepemilikan institusional dan karakteristik komite audit dimana hanya sebagian kecil dari mekanisme pengawasan internal perusahaan yang diduga mampu mengurangi adanya *agency problem*.
2. *Financial distress* pada penelitian ini juga hanya diukur dengan model Zmijewski.
3. Tidak meneliti lebih jauh mengenai struktur kepemilikan terkonsentarsi di Indonesia. Karakteristik perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah perusahaan kepemilikan keluarga, dimana sebagian besar saham dimiliki oleh keluarga atau dengan kata lain, kepemilikan terkonsentrasi berada di tangan keluarga.

4. Penelitian ini tidak menguji hubungan *causality* atau hubungan sebab akibat yang mungkin terjadi antara proksi-proksi *corporate governance* dan *financial distress*. Belum terdapat kejelasan dan bukti yang kuat mengenai hubungan sebab akibat yang dapat terjadi, dimana dimungkinkan bahwa kondisi *financial distress* mampu mengubah struktur *corporate governance* dan struktur kepemilikan saham perusahaan (Miglani, Ahmed dan Henry, 2015).

### 5.3 Saran

Penelitian mengenai *financial distress* dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil yang penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini:

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan lebih membatasi pada *industry* tertentu sehingga mengurangi adanya *industrial effect*.
2. Menggunakan *proxy* lain untuk variabel *financial distress* agar lebih menggambarkan kondisi *financial distress*, misalnya menggunakan proksi *Z-Score*. Atau pengukuran *financial distress* lainnya yang lebih akurat, misalnya dengan melihat profitabilitas perusahaan atau efisiensi kinerja manajemen.
3. Menambah variabel karakteristik komite audit, misalnya kompetensi komite audit serta menambah tahun penelitian.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengidentifikasi faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* seperti tidak hanya mekanisme pengawasan internal perusahaan tetapi juga pengawasan dari eksternal party lainnya seperti

kepemilikan asing, ataupun kepemilikan pemerintah. Serta menguji lebih jauh mengenai kepemilikan terkonsentarsi di Indonesia dimana struktur kepemilikan di Indonesia sebagian besar merupakan kepemilikan keluarga. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menguji adanya hubungan *causality* antara *corporate governance* dan *financial distress* dimana kondisi *financial distress* yang di alami perusahaan juga mampu berpengaruh terhadap organ-organ perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). *Audit Committee Characteristics and Financial Misstatement: A Study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon Committee Recommendations*. A Journal of Practice & Theory, Vol 23, No 1, 69-87.
- Altman, E. I. (1968). *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*. The journal of finance, 23(4), 589-609.
- Ariesta, D.R, dan, Chariri, A. 2013. "Analisis Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan Saham dan Komite Audit Terhadap Financial Distress". Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-9.
- Beaver, W. H., Correia, M., & McNichols, M. (2011). *Financial statement analysis and the prediction of financial distress*: Now Publishers Inc.
- Becht, M., Bolton, P. and Roell, A. (2002). *Corporate Governance and Corporate Control*. ECGI Working Paper Series in Finance 02/2002, also in (G.Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, eds.), *Handbook of Finance*, Amsterdam: North Holland.
- Bredart, X. 2014. *Financial Distress and Corporate Governance: The Impact of Board Configuration*. International Business Research, Vol. 7, No. 3.
- Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2000). *Audit committee composition and auditor reporting*. The Accounting Review, 75(4), 453-467.
- Daily, C. M., & Dalton, D. R.(1994). *Bankruptcy and corporate governance: The impact of board composition and structure*. Academy of Management journal, 37(6), 1603-1617.
- Elloumi, F., & Gueyie, J.-P. (2001). *Financial Distress and Corporate Governance: An Empirical Analysis*. Corporate Governance: The international journal of business in society, 1(1), 15-23.
- FCGI (*Forum For Corporate Governance In Indonesia*). 2001. Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan *corporate governance*. Jilid II, Edisi 2. Jakarta.
- Geng, R., Bose, I., & Xi, C. (2014). *Prediction of Financial Distress: An Empirical Study of Listed Chinese Companies Using Data Mining*. European Journal of Operational Research.

Gideon, Arthur. (2017). Meskipun Menguat, Rupiah Masih Bertengger di 13.480 per Dolar AS. [www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com). Diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

- Ghafran, C., & O'Sullivan, N. (2013). *The governance role of audit committees: reviewing a decade of evidence*. International Journal of Management Reviews, 15(4), 381-407.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *Essentials of econometrics*. Tata McGraw- Hill Education.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta. (<http://ecgi.org>).
- Khaliq, A., Altarturi, B. H. M., Thaker, H. M. T., Harun, M. Y., & Nahar, N. (2014). *Identifying Financial Distress Firms: A Case Study of Malaysia's Government Linked Companies (GLC)*. International Journal, 3(3).
- Manzaneque, M., Priego, M. A., & Merino, E. (2015). *Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain*. Spanish Accounting Review.
- Miglani, S. (2014). *Voluntary Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Healthy Firms: A Study of The Efficacy of The ASX Corporate Governance Council Recommendation*. Corporate Ownership & Control, 308.
- Miglani, S., Ahmed, K., & Henry, D. (2015). *Voluntary corporate governance structure and financial distress: evidence from Australia*. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 18-30.
- Nahar Abdullah, S. (2006). *Board structure and ownership in Malaysia: the case of distressed listed companies*. Corporate Governance: The international journal of business in society, 6(5), 582-594.
- Ntim, C. G. (2013). *Monitoring board committee structure and market valuation in large publicly listed South African corporations*. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 5(3), 310-325.
- Ohlson, J. A. (1980). *Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy*. Journal of accounting research, 109-131.
- Pembayun, A.G., dan I. Januarti, 2012, Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress, Journal of Accounting, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012:1-15.

- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). *Predicting corporate financial distress: reflections on choice-based sample bias*. Journal of Economics and Finance, 26(2), 184-199.
- Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). *Corporate Ownership around the World*. The Journal of Finance, 54(2), 471-517.
- Rahmat, M. M., & Iskandar , M. T. (2009). *Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed companies*. Managerial Auditing Journal, 624 - 638.
- Ross, S. A. (1973). *The economic theory of agency: The principal's problem*. The American Economic Review, 134-139.
- Salloum, C., & Azoury, N. (2012). *Corporate governance and firms in financial distress: evidence from a Middle Eastern country*. International Journal of Business Governance and Ethics, 7(1), 1-17.
- Salloum, C., Azzi, G., & Gebrayel, E. (2014). *Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context: Evidence of the Lebanese Financial Institutions*. International Strategic Management Review, 2(1), 39-45.
- Salloum, C. C., Azoury, N. M., & Azzi, T. M. (2013). *Board of directors' effects on financial distress evidence of family owned businesses in Lebanon*. International Entrepreneurship and Management Journal, 9(1), 59-75.
- Song, J., & Windram, B. (2000). *The effectiveness of the audit committee: experience from UK*. Napier University Business School, Edinburgh.
- Thomsen,S.,Pedersen,T.,Kvist,K.H,2006. *Blockholder ownership : Effects on firm value in market and control based governance system*. Journal of Corporate Finance 12 (2006),246-269.
- Tjager, I. N. (2003). Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia: Prenhallindo.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 tentang Perseroan Terbatas
- Wanke, P., Barros, C. P., & Faria, J. R. (2015). *Financial Distress Drivers In Brazilian Banks: A Dynamic Slacks Approach*. European Journal of Operational Research, 240(1), 258-268.
- Zmijewski, M. E. (1984). *Methodological Issues Related To The Estimation Of Financial Distress Prediction Models*. Journal of accounting research, 59-82.